CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Vita Devianti, Luki Pramono
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl.Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah
E-mail: puspavita30@gmail.com lukipramono1@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber nilai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pancasila sebagai etika politik serta implikasinya dalam praktik demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi strategis sebagai pedoman moral bagi penyelenggara negara dan pelaku politik dalam menjalankan kekuasaan secara adil, demokratis,dan berkeadaban. Namun demikian, dalam praktik politik masih ditemukan berbagai pelanggaran etika politik,seperti politik uang, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan merusak kualitas demokrasi.Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem dan mekanisme politik yang bersifat prosedural, tetapi juga sebagai proses yang harus dijalankan berdasarkan prinsip moral dan etika politik. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya integritas elite politik, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, serta polarisasi sosial yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi memerlukan landasan etika yang kuat agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan nasional.

Kata kunci: Pancasila, Politik, Demokrasi

ABSTRACT

Pancasila is the foundation of the state and the source of ethical political values in national life in Indonesia. This article aims to examine in depth the role of Pancasila as a political ethic and its implications for democratic practices in Indonesia. The research method used is a normative juridical method with a conceptual approach and literature review. The results of the study indicate that the values of Pancasila have a strategic function as moral guidelines for state administrators and political actors in exercising power in a just, democratic, and civilized manner. However, in political practice, various violations of political ethics, such as money politics, are still found, which contradict the values of Pancasila and undermine the quality of democracy. The implementation of democracy in Indonesia cannot be separated from the values of Pancasila, the foundation of the

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

state and the nation's ideology. Democracy is not only understood as a procedural political system and mechanism, but also as a process that must be carried out based on moral principles and political ethics. In practice, democracy in Indonesia still faces various problems, such as low integrity of the political elite, money politics, abuse of power, and social polarization that have the potential to threaten national unity. These problems demonstrate that democracy requires a strong ethical foundation to function in accordance with national goals.
***Keywords**: Pancasila, Politics, Democracy*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang sangat luas. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun politik. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan pemimpin atau pergantian kekuasaan secara periodik, tetapi juga sebagai proses yang menuntut adanya nilai, norma, dan etika yang mengatur perilaku politik seluruh elemen bangsa. Tanpa landasan etika yang kuat, demokrasi berpotensi kehilangan substansi dan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Indonesia sebagai negara demokratis memiliki karakteristik yang khas, karena demokrasi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai tersebut secara fundamental termuat dalam Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman konstitusional dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan etika politik yang membimbing kehidupan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai landasan filosofis dan etis.

Dalam konteks politik, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar konstitusional, tetapi juga sebagai etika politik yang mengarahkan perilaku para pemimpin, penyelenggara negara, dan warga negara. Etika politik Pancasila menuntut agar setiap proses dan keputusan politik dijalankan berdasarkan nilai moral, keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan umum. Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan masih maraknya praktik-praktik politik yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi.

penyelenggaraan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, polarisasi politik, serta rendahnya etika dalam kompetisi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang dijalankan tanpa landasan etika akan berpotensi merusak tujuan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan etika politik yang kuat sebagai pedoman moral dalam kehidupan berpolitik.

Pancasila sebagai etika politik mengandung seperangkat nilai yang mampu memberikan arah dan batasan moral dalam penyelenggaraan demokrasi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pentingnya moralitas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam berpolitik. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia serta

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar demokrasi yang berorientasi pada musyawarah, dialog, dan kebijaksanaan. Sementara itu, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa tujuan akhir demokrasi adalah tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Pancasila berperan penting sebagai sumber nilai dan norma etika politik. Setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip moral yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, pembahasan mengenai Pancasila sebagai etika politik menjadi sangat relevan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam praktik politik dan demokrasi. Pancasila sebagai etika politik menuntut adanya keselarasan antara kekuasaan dan tanggung jawab, antara kebebasan dan keadilan, serta antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan demokrasi diharapkan mampu menciptakan kehidupan politik yang beradab, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan topik etika politik dan Pancasila. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila sebagai etika politik dalam sistem demokrasi Indonesia.

PEMBAHASAN

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak. Dalam kehidupan politik, etika berfungsi sebagai alat pengendali agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Politik sendiri merupakan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan dan kepentingan publik.

Etika politik Pancasila menempatkan nilai-nilai moral sebagai landasan utama dalam penggunaan kekuasaan negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut adanya kejujuran dan integritas moral dalam setiap tindakan politik. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila Persatuan Indonesia menghendaki agar praktik politik tidak memecah belah bangsa. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan demokrasi yang beretika, sedangkan Sila Keadilan Sosial menuntut pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Salah satu bentuk pelanggaran etika politik yang sering terjadi adalah praktik politik uang dalam pemilu. Politik uang merusak prinsip demokrasi karena menghilangkan kebebasan dan rasionalitas pemilih. Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat dan kelima, karena mencederai kedaulatan rakyat dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik.

Tantangan utama dalam penerapan Pancasila sebagai etika politik antara lain rendahnya kesadaran moral elite politik, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya keteladanan pemimpin. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya penguatan melalui pendidikan politik berbasis Pancasila, reformasi sistem politik, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

PENUTUP

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai etika politik dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman utama bagi penyelenggara negara dan pelaku politik agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Penegakan hukum dan etika politik secara konsisten diperlukan untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran etika politik, sehingga demokrasi Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun dan menuntun kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan demokrasi, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol atau landasan konstitusional, tetapi juga sebagai sumber etika politik yang memberikan arah moral bagi seluruh proses politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, persatuan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi yang dijalankan tanpa etika politik berpotensi melahirkan praktik-praktik politik yang menyimpang dari tujuan luhur demokrasi itu sendiri. Fenomena seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, intoleransi, dan polarisasi politik merupakan bukti bahwa demokrasi memerlukan fondasi nilai yang kuat. Dalam hal ini, Pancasila hadir sebagai pedoman etis yang mampu menyeimbangkan kebebasan politik dengan tanggung jawab moral, sehingga demokrasi tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada kemaslahatan rakyat.

Penerapan Pancasila sebagai etika politik menuntut komitmen dari seluruh elemen bangsa, baik penyelenggara negara, elite politik, maupun masyarakat. Para pemimpin dan aktor politik dituntut untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Sementara itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya demokrasi serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran moral.

Selain itu, penguatan pendidikan Pancasila dan etika politik menjadi langkah yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa yang demokratis dan berintegritas. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, serta semangat persatuan sejak dini. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara mendalam sehingga mampu diwujudkan dalam perilaku politik yang beradab dan bermartabat.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai etika politik dalam penyelenggaraan demokrasi, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila akan menghasilkan kehidupan politik yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang berkarakter, berkeadilan, dan sesuai dengan jati diri bangsa.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Franz Magnis-Suseno. (1991). Etika Politik. Jakarta: Gramedia.
Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-nilai Pancasila dan dinamika etika politik Indonesia.
Hartati, H., & Putra, F. (2019). Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia.
Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia.
Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Notonagoro. (2012). Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.
Winarno. (2019). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
Magnis-Suseno, F. (2018). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.